

**PT. BPR KOSANDA**  
**LAPORAN TAHUNAN BPR TAHUN 2019**

**A. INFORMASI UMUM**

**1. SUSUNAN KEPENGURUSAN**

Berdasarkan akta nomor: 64, tanggal 19 Januari 2018, yang dibuat oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH, Notaris di Surabaya, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2018 dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0026603, bahwa susunan kepengurusan PT. BPR KOSANDA per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
<b>DIREKSI</b>	
1. Sie Irwan Budiyo	Direktur Utama
2. Prihartono	Direktur
3.	Direktur Kepatuhan (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
<b>DEWAN KOMISARIS</b>	
1. Wirjanto Wangsawinata	Komisaris Utama
2. Ayuna Elizabeth Frederika	Komisaris
<b>PEJABAT EKSEKUTIF</b>	
1. Sumarno	PE Fungsi Kepatuhan / Manajemen Risiko
2. Marfia	PE Fungsi Audit Intern
3. Sumarno	Kepala Bagian Operasional
4. Rendra Hudaya	Kepala Bagian Kredit

**2. RIWAYAT SINGKAT DIREKSI**

**SIE IRWAN BUDIYANTO**

DATA PRIBADI	KETERANGAN
Tempat dan tanggal lahir	Probolinggo, 10 Februari 1957
Alamat	Waterplace Residence Tower B.0109, RT.002/ RW.009, Kel. Babatan, Wiyung - Surabaya.
N.I.K	3578261002570001

N.P.W.P	06.963.830.2.619.000
<b>Pendidikan Formal Yang Ditempuh :</b>	
Sekolah Dasar (SD)	SD Katolik Mater Dei, di Probolinggo, Lulus tahun 1971
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP Katolik Mater Dei, Probolinggo, Lulus tahun 1974
Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Katolik Mater Dei, Probolinggo, Lulus tahun 1977
Perguruan Tinggi	Strata 1, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Perusahaan, Tahun 1983
<b>Pengalaman Kerja Yang Dimiliki :</b>	
Bank Umum Nasional, Surabaya	Account Officer tahun 1984 Pimpinan Cabang Pembantu tahun 1988
Bank Danamon Indonesia, Surabaya	Pimpinan Cabang Pembantu tahun 1993
Bank Harfa, Sidoarjo	Pimpinan Cabang Pembantu tahun 2000
Amin Bank, Surabaya	Kepala Cabang, Tahun 2001
PT. BPR Kosanda, Surabaya	Menjabat Direktur Utama, tahun 2015
<b>Pemegang Sertifikat Kompetensi :</b>	
Sertifikat Kompetensi	Pemegang Sertifikasi Kompetensi Profesi Direktur Tingkat-1 BPR oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro dan dinyatakan Kompeten tahun 2008, dan terakhir telah mengikuti Survailen Kompetensi Profesi Direktur Tingkat-1 BPR tahun 2018, dengan Sertifikat Kompetensi nomor : 65100 12106 0554 2013.

### **PRIHARTONO**

<b>DATA PRIBADI</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tempat dan tanggal lahir	Surabaya, 23 Juli 1968
Alamat	Siwalankerto Tengah No.244, RT.005/RW.003, Kel. Siwalankerto, Wonocolo - Surabaya
N.I.K	3578022307680001
N.P.W.P	49.149.082.7.609.000
<b>Pendidikan Formal Yang Ditempuh :</b>	
Sekolah Dasar (SD)	Lulus tahun 1983
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP 17 di Surabaya, Lulus tahun 1985

Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Xaverius di Ambon, Lulus tahun 1988
Perguruan Tinggi	a) Strata I, Universitas Pattimura Ambon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Ilmu Administrasi Ilmu Pemerintahan, tahun 1992 b) Strata II, Magister Manajemen STIE Artha Bodhi Iswara (ABI) Surabaya, tahun 2008.
<b>Pengalaman Kerja Yang Dimiliki :</b>	
Bank Danamon Indonesia, Surabaya	Marketing Officer, tahun 1996
Amin Bank, Surabaya	Kepala Bagian Marketing, tahun 2003 Kepala Bagian Analis Kredit, tahun 2005
Bank Of India Indonesia, Surabaya	Kepala Bagian Analis Kredit, tahun 2007
PT. BPR Kosanda, Surabaya	Menjabat Direktur, tahun 2015
<b>Pemegang Sertifikat Kompetensi :</b>	
Sertifikat Kompetensi	Pemegang Sertifikasi Kompetensi Profesi Direktur Tingkat-1 BPR oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro dan dinyatakan Kompeten tahun 2014, dan terakhir telah mengikuti Survailen Kompetensi Profesi Direktur Tingkat-1 BPR tahun 2019, dengan Sertifikat Kompetensi nomor : 64127 11206 5363 2019.

### 3. RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS

#### WIRJANTO WANGSAWINATA

DATA PRIBADI	KETERANGAN
Tempat dan tanggal lahir	Banyuwangi, 2 Februari 1957
Alamat tempat tinggal	Taman Surya Blok C / 1, RT.019 RW.002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
N.I.K	3173020202570002
N.P.W.P	06.031.760.9.031.000
<b>Pendidikan Formal Yang Ditempuh :</b>	
Sekolah Dasar (SD)	YPK Ketabang Kali, di Surabaya, Lulus tahun 1970
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	YPK Ketabang Kali, di Surabaya, Lulus tahun 1973
Sekolah Menengah Atas (SMA)	Dapena, di Surabaya, Lulus tahun 1976
Perguruan Tinggi	Strata-I, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Lulus tahun 1981

<b>Pengalaman Kerja Yang Dimiliki :</b>	
Dharmala Grup, Jakarta	Internal Auditor, tahun 1981
PT. Putra Adi Mulia, Jakarta	Manajer, tahun 1983
Bank Dharmala, Jakarta	Direktur Marketing dan Treasury, tahun 1985
PT.Satria Saka Pratama, Jakarta	Komisaris Utama, tahun 1995
PT.Nexus Utama, Jakarta	Komisaris Utama, tahun 1995
PT. BPR Kosanda, Surabaya	Komisaris Utama, tahun 1997 sampai sekarang
<b>Pemegang Sertifikat Kompetensi :</b>	
Sertifikat Kompetensi	Belum memiliki Sertifikasi Kompetensi Profesi Komisaris BPR

**AYUNA ELIZABETH FREDERIKA**

<b>DATA PRIBADI</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tempat dan tanggal lahir	Surabaya, 2 Juli 1953
Alamat tempat tinggal	Perum. Tropodo Indah Blok L No.8, Waru, Sidoarjo
N.I.K	3515184207530001
N.P.W.P	18.748.926.5-606.000
<b>Pendidikan Formal Yang Ditempuh :</b>	
Sekolah Dasar (SD)	SD Negeri Pucang I, di Sidoarjo, Lulus tahun 1965
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP Katolik Stella Maris di Surabaya, Lulus 1968
Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Katolik Stella Maris di Surabaya, Lulus 1971
Perguruan Tinggi	Diploma 3, Akademi Bank dan Manajemen Satya Widya di Surabaya, Lulus tahun 1977
<b>Pengalaman Kerja Yang Dimiliki :</b>	
Bank Niaga, Surabaya	Service Assistance & Sekretaris Marketing, tahun 1977
Bank Rama, Surabaya	Kepala Bagian Kredit, tahun 1980
Bank Dagang Nasional Indonesia, Surabaya	Internal Auditor, tahun 1988
Bank Danamon Indonesia, Surabaya	Internal Auditor, tahun 1992
PT. BPR Central Niaga, Surabaya	Direktur, tahun 2008
PT. BPR Kosanda, Surabaya	Komisaris, tahun 2009 sampai sekarang
<b>Pemegang Sertifikat Kompetensi :</b>	
Sertifikat Kompetensi	Pemegang Sertifikasi Kompetensi Profesi Direktur

	Tingkat-1 BPR oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro dan dinyatakan Kompeten pada tahun 2007, telah mengikuti Survailen Kompetensi Profesi Direktur Tingkat-1 BPR tahun 2017, dan terakhir telah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Profesi Komisaris BPR tahun 2019, dengan Sertifikat Kompetensi nomor : 64127 11206 3622 2019.
--	--

#### 4. KEPEMILIKAN SAHAM

Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-136/KR.31/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank, dan Akta Nomor 45 tanggal 28 Mei 2015 oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH, Notaris di Surabaya, bahwa Modal Dasar Bank sebesar Rp.10.000.000 ribu, dan dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebesar Rp.5.000.000 ribu yang terbagi atas 5.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp.1.000 ribu dengan perincian sebagai berikut:

NAMA PEMILIK	NOMINAL (Rp)	PROSEN	STATUS
PT. Nexus Utama	4.900.000	98,00 %	Pengendali
Wirjanto Wangsawinata	50.000	1,00 %	Pengendali
Thio Gwan Po Micky	50.000	1,00 %	Pengendali
<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00 %</b>	

#### 5. PERKEMBANGAN USAHA

##### a. RIWAYAT RINGKAS BPR

PT. BPR KOSANDA Surabaya, semula bernama PT. BANK PASAR KOSANDA, didirikan berdasarkan Akta Nomor 50 tanggal 30 Oktober 1971 dibuat dihadapan Notaris Sindhunata, SH, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Moneter sesuai dengan Surat Keterangan No.S.Ket.81/DJM/III.3/2/1973 tanggal 28 Februari 1973.

Perubahan nama Bank sesuai dengan Akta Nomor : 70 tanggal 16 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, SH, Notaris di Surabaya dengan merubah nama menjadi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOSANDA disingkat PT. BPR KOSANDA, berkantor di Jl. Coklat No.21, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya.

PT. BPR KOSANDA telah beberapa kali merubah anggaran dasarnya dan telah menyesuaikan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Notaris Soesilowati, SH, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-6824.AH.01.02 Tahun 2008 pada tanggal 17 September 2008. Perubahan terakhir sesuai dengan akta nomor 64 tanggal 19 Januari 2018 oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 19 Januari 2018 dengan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0026603.

Maksud dan tujuan bank adalah bergerak di bidang perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau pengusaha kecil dalam bentuk kredit.

#### b. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Ikhtisar Data Keuangan PT. BPR KOSANDA pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rp)

KETERANGAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TUMBUH	PROSEN
1. Total Aset	57.599.120	55.688.197	1.910.923	3,43%
2. Kredit yang diberikan	51.923.262	48.939.182	2.984.080	6,10%
3. Simpanan pihak ketiga	46.848.089	46.306.520	541.569	1,17%
4. Pend. Operasional	8.306.366	7.216.155	1.090.211	15,11%
5. Beban Operasional	6.836.556	6.103.859	732.697	12,00%
6. Pend. Non Operasional	300	0	300	%
7. Beban Non Operasional	7.530	108.704	(101.174)	(93,07%)
8. Laba Sebelum Pajak	1.462.580	1.003.592	458.988	45,73%
9. Taksiran Pajak Badan	267.691	174.132	93.559	53,73%
10.Laba Bersih	1.194.889	829.460	365.429	44,06%

#### c. RASIO-RASIO KEUANGAN

Rasio-rasio keuangan PT. BPR KOSANDA per 31 Desember 2019 :

KETERANGAN	PROSEN
1. Kualitas Aktiva Produktif ( KAP )	0,72%
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	40,27%
3. Non Performing Loan (NPL)	0,45%
4. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif ( PPAP )	100,00%
5. Return On Asset ( ROA )	2,54%

6. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82,31%
7. Cash Ratio ( CR )	8,64%
8. Loan to Deposit Ratio ( LDR )	93,08%

**d. PERBANDINGAN JUMLAH KREDIT BERMASALAH TERHADAP TOTAL KREDIT**

KETERANGAN	SALDO KREDIT
1. Total Kredit yang diberikan ( <i>baki debet</i> )	52.060.936
2. Kredit non Lancar	
2.1. Kurang Lancar	200.000
2.2. Diragukan	16.720
2.3. Macet	16.636
Jumlah Kredit Non Lancar	233.356
3. Perbandingan Jumlah Kredit non lancar terhadap Total Kredit	0,45 %

Penyebab utama terjadinya kredit bermasalah diantaranya adalah kredit telah jatuh tempo, usaha Debitur mengalami kemunduran, dan etiket kurang baik Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

**e. PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP BPR**

Menurunnya jumlah Penempatan pada Bank lain dalam bentuk Giro sebesar Rp.1.043.731 ribu dari tahun 2018 atau 20,01%, dan tidak tercapainya target Penempatan pada Bank lain dalam bentuk Giro dengan pencapaian target sebesar 51,06%, dan target penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito dengan pencapaian target sebesar 94,30%, hal demikian dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha PT. BPR KOSANDA.

Pada periode pelaporan tahun 2019 tidak terdapat penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan / atau jaringan kantor yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha PT. BPR KOSANDA.

**6. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN BPR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN USAHA BPR.**

Sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BPR adalah kondisi perekonomian global, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah, penentuan pangsa pasar yang memiliki prospek cukup baik, dan Rencana Bisnis BPR yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan Manajemen Resiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, khususnya Account Officer (AO).

Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat dalam pelaksanaan pemberian kredit harus dilakukan secara konsisten agar kredit yang diberikan senantiasa lancar, dan menghindari penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang menyimpang dalam pemberian kredit, karena penyimpangan sekecil apapun merupakan awal dari timbulnya suatu resiko.

Pengendalian risiko terhadap kebijakan pemberian kredit diluar wilayah operasional BPR, khususnya wilayah Jakarta, dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Calon debitur telah dikenal dengan baik dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris atau Pejabat Group Perusahaan yang berada di Jakarta,
- b. Mempunyai usaha yang masih berjalan dan memiliki prospek usaha yang baik,
- c. Agunan kredit barang bergerak berupa kendaraan bermotor atau stock barang harus marketable,
- d. Melakukan kunjungan on the spot (OTS) yang dapat dilakukan oleh Pejabat BPR maupun Pejabat Group Perusahaan setidaknya sekali dalam setahun yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi usaha debitur dan agunan kredit,
- e. Melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan debitur melalui telepon minimal 3 bulan sekali.

## **7. LAPORAN MANAJEMEN TENTANG PENYAJIAN INFORMASI MENGENAI PENGELOLAAN BPR DALAM RANGKA PENERAPAN TATA KELOLA**

### **a. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi PT. BPR KOSANDA disusun sesuai dengan kondisi yang ada yang dapat memenuhi kebutuhan pada saat ini akan tetapi diharapkan mampu menghadapi tantangan kedepan.

(Struktur Organisasi terlampir dalam Lampiran-1).

### **b. Bidang Usaha sesuai Anggaran Dasar dan Kegiatan Utama BPR**

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi maka kegiatan utama PT. BPR KOSANDA adalah :

- Menerima atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan dan Deposito,
- Menyalurkan kembali kepada masyarakat / pengusaha dalam bentuk pemberian kredit, kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bentuk Kredit Modal Kerja dan Konsumtif,
- Melayani masyarakat untuk jasa-jasa perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku,
- Menempatkan dananya dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito pada bank lain.



**c. Teknologi Informasi**

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional Bank dan menyajikan keakuratan data, PT. BPR KOSANDA telah menjalin kerjasama dengan PT. INTI SISTEM SARANA SEJAHTERA yang sebelumnya dikenal nama CV. Inti Computer, berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No.67 Pare, Kota Kediri, sebagai penyedia jasa pengembangan teknologi informasi yang disebut Sistem Informasi Perbankan Terpadu (SIPT) meliputi system operasi : Kredit, Tabungan, Deposito, Akunting, Data Master Nasabah, Laporan Bulanan BPR sesuai POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK, dan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

**d. Perkembangan dan Target Pasar**

(Dalam ribuan rupiah).

KETERANGAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TARGET PASAR
Kredit yang diberikan	51.923.262	48.939.182	UMKM
Tabungan	1.852.829	1.200.736	Masyarakat Umum
Deposito berjangka	44.995.260	45.105.784	Masyarakat Umum

Target pasar terhadap penyaluran kredit difokuskan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan menekankan pada Sektor Ekonomi Kontruksi, Perdagangan besar dan eceran, Transportasi, Real Estate, dan Konsumsi.

Target pasar terhadap penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito diutamakan kepada masyarakat umum.

**e. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor**

Sampai dengan akhir tahun 2019 PT. BPR KOSANDA belum membuka Kantor Cabang maupun Kantor Kas, dan hanya memiliki satu kantor yaitu Kantor Pusat yang berlokasi di Jalan Coklat no.21, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya.

**f. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga lain Dalam Rangka Pengembangan Usaha**

Dalam rangka pengembangan usaha PT. BPR KOSANDA pada bulan Desember 2019 telah menjalin kerja sama dengan Bank CIMB NIAGA Kantor Cabang Jl. Tidar Surabaya dalam rangka Linkage Program dengan plafon kredit sebesar Rp.10.000.000 ribu, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, suku bunga 9,50% (sembilan koma lima puluh persen).

Sedangkan dalam pelayanan jasa penghimpunan dana pihak ketiga maupun penarikan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito PT. BPR KOSANDA belum menjalin kerja sama dengan Bank Umum maupun BPR lain dan masih bersifat berdikari.

**g. Kepemilikan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Perubahan Kepemilikan dari Tahun Sebelumnya**

(Dalam Ribuan Rp)

KEPEMILIKAN	PERSEN (%)	NOMINAL
<b>ANGGOTA DIREKSI</b>		
1. Sie Irwan Budiyanto	0	0
2. Prihartono	0	0
<b>DEWAN KOMISARIS</b>		
1. Wirjanto Wangsawinata	1	50.000
2. Ayuna Elizabeth Frederika	0	0

Pada periode tahun 2019 tidak terdapat perubahan kepemilikan PT. BPR KOSANDA dari tahun sebelumnya.

**h. Keterkaitan Antar Pemilik, Antar Pengurus, dan Antara Pemilik dengan Pengurus BPR**

- 1) Antar Pemilik, tidak terdapat keterkaitan antar pemilik dalam hubungan keluarga maupun keuangan,
- 2) Antar Pengurus, tidak terdapat keterkaitan antar pemilik dalam hubungan keluarga maupun keuangan,
- 3) Antar Pemilik dan Pengurus, tidak terdapat keterkaitan antar pemilik dalam hubungan keluarga maupun keuangan.

**i. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Direksi	2	2				
Komisaris	2	1	1			
Pejabat Eksekutif	3	2	1			
Administrasi	7	3	1	3		
Marketing	2	2				
Office boy	1				1	
<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia, Manajemen PT. BPR KOSANDA telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan

dengan mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh PT. BPR Kosanda sendiri maupun pihak lain.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti selama tahun 2019 diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Sertifikasi Komisaris BPR, program lanjutan dari Direktur Tingkat-1 BPR yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan DPD Perbarindo Jawa Timur,
- 2) Workshop tentang Pelaporan SIPEDULI melalui system pelaporan OJK yang diselenggarakan oleh OJK Jakarta ,
- 3) Workshop tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR berdasar POJK No.33/POJK.03/2018,yang diselenggarakan oleh Jakarta Financial Institute
- 4) Workshop tentang Aplikasi Manajemen Risiko berbasis Web untuk Risiko Inheren dan KPMR, yang diselenggarakan oleh Mandiri Consulting
- 5) Pelatihan Training of Trainer (TOT) dan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah serta tata cara perlakuan uang, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia,
- 6) Seminar Nasional dan Penganugerahan 10 Infobank BPR Awards 2019, yang diselenggarakan oleh Infobank bekerjasama dengan DPP Perbarindo.
- 7) Surveilen dan Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur TK-1 BPR, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan DPD Perbarindo Jawa Timur,
- 8) Workshop Penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Microfinance Learning Center (MLC) Surabaya
- 9) Seminar Nasional dan Rakernas Perbarindo, yang diselenggarakan oleh DPP Perbarindo Jakarta,
- 10) Sosialisasi POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan PPAP BPR, Inhouse Training PT. BPR Kosanda.

**j. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris,**

- 1) Gaji kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2) Gaji kepada Karyawan ditetapkan oleh Direksi,
- 3) Gaji dibayarkan secara bulanan dalam bulan berjalan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun,
- 4) Tunjangan Hari Raya (THR) sekali dalam setahun, sebesar satu kali gaji,
- 5) Bonus tahunan diberikan berdasarkan kinerja pencapaian target-target dalam Rencana Bisnis BPR.

- 6) Fasilitas lain kepada anggota Direksi berupa Kendaraan Mobil Dinas beserta perawatannya.

**k. Perubahan penting lainnya yang mempengaruhi Operasional BPR**

Tidak terdapat perubahan penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara signifikan operasional BPR selama tahun 2019.

**B. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 disusun untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam Lampiran-2 sampai dengan Lampiran-7 meliputi :

1. Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas,
4. Laporan Arus Kas,
5. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi,

**C. OPINI AKUNTAN PUBLIK**

Menurut Opini Kantor Akuntan Publik (KAP) Luthfi Muhammad dan Rekan, KAP di Sidoarjo, bahwa Laporan Keuangan PT. BPR KOSANDA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, menyajikan secara **Wajar** dalam semua hal yang material, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

**D. PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURE*) INFORMASI LAINNYA**

**1. IHKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Pernyataan BPR Menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku bagi BPR dan PA BPR**

Laporan Keuangan PT. BPR KOSANDA Tahun 2019 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku bagi BPR dan berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).

**b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur Aset, Kewajiban, Penghasilan dan Beban dalam Laporan Keuangan, dan dasar pengukuran adalah biaya historis dan nilai wajar.

Aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

Penghasilan dan Beban dalam Laporan Keuangan merupakan akibat langsung dari pengakuan Aset dan Kewajiban.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR). Laporan Keuangan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (*going concern*) serta mengikuti konvensi harga historis (*historical cost*).

Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan Metode Akruwal kecuali Laporan Arus Kas, dimana Laporan Arus Kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan Arus Kas dalam Aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan.

Periode Akuntansi adalah menurut tahun takwim atau tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, dan Laporan keuangan disajikan dalam Satuan Mata Uang Rupiah.

### c. Kebijakan Akuntansi

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

#### 1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi Kas, Giro pada bank lain, Penempatan pada bank lain, Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

#### 2) Penempatan Pada Bank Lain (PBL)

Penempatan Pada Bank Lain dinyatakan sebesar Saldo Penempatan pada bank lain yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito berjangka dikurangi dengan penyisihan penghapusan asset produktif atas penempatan pada bank lain kecuali Giro.

Besarnya penyisihan penghapusan aset produktif atas penempatan pada bank lain (PBL) ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo penempatan pada akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

### **3) Kredit Yang Diberikan (KYD)**

Kredit yang Diberikan dinyatakan sebesar saldo Nilai Realisasi Kredit yang Diberikan dikurangi dengan saldo Provisi yang belum diamortisasikan ditambah Biaya Transaksi dan dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atas Kredit yang diberikan.

Besarnya Penyisihan Penghapusan Aset Produktif atas Kredit yang Diberikan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo Kredit yang diberikan akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Kredit yang diklasifikasikan sebagai Non Performing pada saat kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai non performing tidak diperhitungkan pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan akan diakui sebagai pendapatan bunga pada saat diterima.

Kredit dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi, dan penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebagai penambahan penyisihan kerugian kredit.

### **4) Penyisihan Kerugian Kredit**

Aset yang digolongkan sebagai aset produktif adalah penyediaan dana BPR dalam bentuk rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Penempatan pada bank lain, dan Kredit yang diberikan.

Pembentukan penyisihan kerugian kredit berdasarkan prosentase tetap dari saldo baki debit setelah dikurangi dengan nilai agunan kredit kecuali untuk kredit yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan berdasarkan saldo baki debit kredit tersebut.

Besarnya penyisihan kerugian kredit berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018

tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, sebagai berikut :

Kolektibilitas	Prosentase	Keterangan
Lancar	0,50%	PPAP Umum
Dalam Perhatian Khusus	0,50%	PPAP Khusus
Kurang Lancar	10,00%	PPAP Khusus
Diragukan	50,00%	PPAP Khusus
Macet	100,00%	PPAP Khusus

Kredit dengan kolektibilitas Lancar digolongkan dalam Penyisihan Kerugian Umum, sedangkan untuk kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet digolongkan dalam Penyisihan Kerugian Khusus.

#### 5) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang tercatat dalam neraca hanya berasal dari penyajian kredit yang diberikan.

Pada saat pengakuan awal AYDA sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat kredit yang diberikan.

Bank tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar AYDA setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai di Laporan Laba Rugi.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari AYDA diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan AYDA dan diakui sebagai Pendapatan atau Beban Non Operasional dalam Laporan Laba Rugi.

#### 6) Aset Tetap dan Inventaris

Aset Tetap dan Inventaris dinyatakan sebesar harga perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap dan inventaris dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, dengan prosentase sebagai berikut :

Jenis Aset	Umur Ekonomis	Prosentase / Tahun
------------	---------------	--------------------

Gedung / Bangunan	20 tahun	5,00%
Inventaris Kantor :		
Golongan I	4 tahun	25,00%
Golongan II	8 tahun	12,50%
Kendaraan Bermotor :		
Golongan I	4 tahun	25,00%
Golongan II	8 tahun	12,50%

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pengeluaran.

Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

#### 7) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud berupa aset non moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang / jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, diantaranya berupa perangkat lunak komputer (*software*) dan dinilai berdasarkan harga perolehannya (*at cost*).

Jangka waktu amortisasi aset tidak berwujud ditetapkan dan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*Straight line method*) selama 4 (empat) tahun dengan tarif sebesar 25,00% per tahun.

#### 8) Imbalan Kerja

Bank mengakui Kewajiban Imbalan Kerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 IMBALAN KERJA. Pengakuan Kewajiban Imbalan Kerja didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayar imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal Mengundurkan diri, Pensiun normal, Meninggal dunia, dan Cacat tetap.

Bank pada saat ini melakukan Kewajiban Imbalan Kerja dengan menggunakan jasa Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank BJB untuk 13 (tiga



belas) orang peserta, dimana jumlah iuran dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta nilai yang terutang pada karyawan telah memenuhi kewajiban seperti yang diwajibkan pada Undang-Undang tersebut.

#### **9) Pengakuan Pendapatan Bunga**

Pendapatan Bunga meliputi Pendapatan Bunga Kontraktual, Amortisasi Provisi, Diskonto, dan Biaya Transaksi yang terkait dengan aset produktif yang digolongkan sebagai performing diakui secara akrual. Sedangkan pendapatan bunga atas kredit dan aset produktif lainnya dengan klasifikasi non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (cash basis).

Pendapatan bunga atas aset produktif dengan klasifikasi non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tagihan bunga, dan penerimaan setoran dari debitur untuk kredit non-performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok yang telah jatuh tempo.

Provisi dan Biaya Transaksi diamortisasikan selama masa kredit secara garis lurus tanpa memperhatikan kredit yang diberikan termasuk performing atau non-performing. Amortisasi provisi diakui sebagai penambah pendapatan bunga dan amortisasi biaya transaksi diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

#### **10) Pengakuan Beban Bunga**

Beban Bunga merupakan beban yang dikeluarkan dan dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga diakui secara akrual dalam laporan Laba Rugi

#### **11) Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan diterapkan dengan metode hutang pajak, dimana kewajiban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Terhadap pendapatan yang terkena pajak final, tidak terdapat beda waktu antara pelaporan komersial dan fiskal. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final untuk laporan komersial berbeda dengan nilai pelaporan fiskal, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada laporan keuangan tahun berjalan.

## 2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas seperti tercantum dalam Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan.

### a. Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa (Pihak Terkait)

- 1) Rincian jumlah transaksi (dalam ribuan) dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa pada pos asset, kewajiban, penghasilan dan beban adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah transaksi masing2 pos	Total asset, kewajiban, penghasilan, dan beban	Persentase terhadap total
Pos Aset	19.214.690	57.599.120	33,36%
Kredit yang diberikan	19.214.690		
Pos Kewajiban	19.327.206	47.418.966	40,76%
Tabungan	579.628		
Deposito	18.747.578		
Pos Penghasilan	1.881.141	8.306.366	22,65%
Pendapatan bunga	1.881.141		
Pos Beban	1.474.158	6.836.556	21,56%
Beban bunga	1.474.158		

- 2) Tidak terdapat transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama BPR sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- 3) Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berkenaan dengan akun Kredit yang diberikan, dan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Tidak terdapat perlakuan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak terkait). Seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak terkait) baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan oleh pihak ketiga dilakukan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan BPR dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- 4) Dasar pembentukan penyisihan kerugian piutang terhadap transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) sesuai dengan POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

**b. Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan**

Tidak terdapat perubahan estimasi akuntansi, kebijakan akuntansi, dan kesalahan di Laporan Keuangan tahun 2019, sehingga tidak diperlukan pengungkapan-pengungkapan tambahan.

Beberapa akun Laporan Keuangan Tahun 2018 telah disajikan kembali agar dapat dikomparasikan dengan Laporan Keuangan Tahun 2019.

**c. Komitmen dan Kontinjensi**

Tidak terdapat komitmen pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait yang menimbulkan komitmen penggunaan dana dimasa yang akan datang, dan tidak terdapat pengungkapan kontinjensi berupa perkara atau sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran biaya pada masa yang akan datang.

Tidak terdapat kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok pajak, dan denda.

**d. Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Bagi BPR dan PA BPR**

Laporan Keuangan PT. BPR KOSANDA tahun 2019 disusun dengan berdasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang masih berlaku.

**e. Reklasifikasi Akun**

Akun-akun pada Laporan Keuangan tahun sebelumnya telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun-akun pada Laporan Keuangan Tahun 2019.

**f. Informasi Penting lain**

Tidak terdapat informasi penting lain meliputi sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja BPR.

**g. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca**

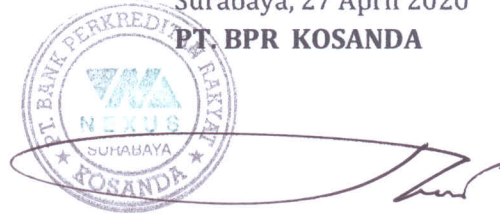
Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi pada akun-akun Laporan Keuangan.

Laporan Tahunan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (SE OJK) Nomor :

39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Surabaya, 27 April 2020

**PT. BPR KOSANDA**



**SIE IRWAN BUDIYANTO**

Direktur Utama